

SKRIPSI

FENOMENA ANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

MANNAWA FARABY



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

SKRIPSI

FENOMENA ANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

MANNAWA FARABY
A31114505



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

SKRIPSI

FENOMENA ANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

MANNAWA FARABY

A31114505

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 29 Juli 2020

Pembimbing I

Dr. Ratna Damayanti, S.E., M.Soc, Sc, Ak., CA
NIP 19670319 199203 2 003

Pembimbing II

Dr. Syamsuddin, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19670414 199412 1 002



Kelua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19660405 199203 2 003

SKRIPSI

FENOMENA ANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

disusun dan diajukan oleh

MANNAWA FARABY

A31114505

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 29 Juli 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ratna Damayanti, S.E., M.Soc, Sc, Ak., CA	Ketua	1. 
2	Dr. Syamsuddin, S.E., M.Si., Ak., CA	Sekretaris	2. 
3	Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA	Anggota	3. 
4	Dr. Darmawati, S.E., Ak., M.Si., CA	Anggota	4. 
5	Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA	Anggota	5. 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA

NIP. 196604051992032003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mannawa Faraby

NIM : A31114505

Departemen/Program Studi : Akuntansi/Strata Satu

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

FENOMENA ANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 29 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Mannawa Faraby

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahiim,

Alhamdulillahirabbilalaamiin,

Allahummasallialamuhammad waalaalimuhammad,

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam semesta yang atas izin serta petunjuk-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Fenomena Anggaran Responsif Gender pada Penanggulangan Kemiskinan**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Departemen Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa berada di jalan perjuangan dan kebenaran. Semoga kita tergolong ke dalam ummat yang akan dipertemukan dengan-Nya kelak di taman-taman surga, aamiin allahumma yaa aamiin.

Secara khusus skripsi ini peneliti persembahkan kepada almarhum ayah, Abd. Latif, dan mama, Rosmiati, yang senantiasa menyertai peneliti dengan doa, cinta, dan kasih sayangnya, maaf atas keterlambatan penyelesaian skripsinya dan terima kasih menjadi sosok yang paling mengerti. Untuk Adik, Nur Farahiyah, terima kasih telah mendukung peneliti selama menjalani perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.

Peneliti juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kontribusi dari berbagai pihak, baik secara nonmateril dan materil,

hingga terselesaikannya skripsi ini. Pada kesempatan ini peneliti dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si., CPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., Ak., M.Si., CA selaku Ketua Departemen Akuntansi dan Drs. Syarifuddin, M.Si. selaku Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Ratna A. Damayanti, S.E., Ak., M.Soc., SC., CA dan Dr. Syamsuddin, S.E., M.Si., Ak., CA selaku pembimbing peneliti. Terima kasih atas dedikasi dalam membimbing peneliti. Semoga Ibu dan Bapak senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah SWT.
4. Bapak selaku penasehat akademik peneliti. Terima kasih atas segala bimbingannya.
5. Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, terkhusus pada informan, yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu berjalannya penelitian ini.
6. Staff Departemen dan akademik FEB-UH, Pak Aso, Pak Ical, Pak Safar, Pak Tarru, Pak Oska, Ibu Saharibullan, dan Ibu Ida. Terima kasih telah memudahkan pengurusan berkas yang selama ini saya butuhkan selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
7. Pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (Sema FEB-UH) periode 2016-2017, terkhusus kepada kak Ahmad sebagai Ketua Sema FEB-UH periode 2018-2019, karena

telah memberikan saya ruang dan pengalaman dalam berkhidmat di Sema FEB-UH.

8. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (Maperwa) periode 2018-2019, Dilla, Rahmat, Mail, Ucca, Ardi, Rara, Yayat, Dion, dan Kiki, yang telah menemani saya dalam menahkodai Maperwa FEB-UH.
9. Pengurus Sema FEB-UH periode 2017-2018, terkhusus kepada presidium saya, Salman (Waketum), Kasmairi (Sekum), dan Mumu (Bendum), yang telah menemani saya menahkodai Sema FEB-UH periode 2017-2018.
10. Lisan Cabang Makassar, terkhusus kepada Fauzi (ketua cabang), yang telah memberikan kepada saya ruang pengkhidmatan untuk berjuang di jalan kebenaran beserta teman-teman Lisan Komisariat lainnya yang telah mendukung Lisan Kom. FIS kompleks Unhas menjalankan fungsi-fungsi organisasinya.
11. Lisan Kom. FIS kompleks Unhas, Unggul, Fadil, Panji, Muhlis, Ona, Indri, Hafidah, Suhal, Azisan, Nursaid, Asrunil, Akbar, Ihwal, Dika, Fajar, Danu, Atun yang telah berjuang bersama membangun Lisan Kom. FIS jauh lebih baik lagi.
12. Teman-teman ALL14NCE terima kasih telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai ketua angkatan dan menemani saya selama perkuliahan hingga sarjana. Kalian adalah segalanya. Dunia sementara, Alliance selamanya!
13. Kakak-kakak Blok J, kak Uya, Kak Anwar, Kak Adin, Kak Iqbal, Kak Amir, Kak Arya, Kak Mamat, Kak Sugi, Kak Aiman, Kak Bucek, Kak Arits, Kak Haris, Kak Muklin, yang telah memberikan ruang menginap dan pembelajaran yang begitu berharga.

14. Kakak-kakak Dialektika, Kak Bulla, Kak Adin, Kak Iqbal, Kak Fikar, Kak Ibe yang telah memberikan saya banyak ilmu sehingga membentuk saya sampai sekarang ini.
15. Teman-teman Proletar yang menjadi teman belajar bersama selama LKTM dan menjadi teman pergerakan di Unhas. Juga teman-teman Cundekking Squad yang menjadi teman riset dan advokasi bersama, Riki, Suyuti, Seno, Kak Imam, Muhlis di Kamung Rimba. Semoga perjuangan kita tidak berhenti setelah menjadi mahasiswa.
16. Deplu Squad, Kak Dian, Kak Yayat, Kak Ilo, Kak Yoyo, Iccang, Udi, Afif, Sadiq, Koke, Taufik, Kak Pa'le, Accang, Sam, Dulla, Appi, yang merupakan tempat awal saya berkembang dan menemukan jalan terbaik saya hingga saat ini.
17. Teman-teman The Dexter, Koke, Afif, Sadiq, Udi, dan Iccang yang merupakan teman masa kecil saya dan menjadi sahabat hingga saat ini. Terima kasih atas persahabatan kita yang tidak ada putusnya.
18. Terakhir terima kasih kepada teman-teman Overthinking, Wiwin, Dion, Nani, Batara, yang menjadi teman riset dan advokasi mace-mace. Dan orang-orang yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Makkassar, 6 Juni 2020

Peneliti

ABSTRAK

Fenomenologi Anggaran Responsif Gender pada Penanggulangan Kemiskinan

The Phenomenology of Gender Responsive Budgeting in Poverty Alleviation

Mannawa Faraby
Ratna A. Damayanti
Syamsuddin

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena anggaran responsif gender dalam penanggulangan kemiskinan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan penyusun anggaran pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa komponen-komponen dalam sikap birokrasi yakni (1) komponen kognitif mengacu pada pemahaman, kepercayaan, atau informasi aparatur terhadap anggaran responsif gender, (2) komponen afektif mengacu pada sikap aparatur terhadap anggaran responsif gender, (3) dan komponen *behaviour* mengacu pada predisposisi aparatur terhadap anggaran responsif gender dalam bertindak. Penelitian ini juga menunjukkan dominasi fakta sosial material dalam penerapan anggaran responsif gender.

Kata kunci: anggaran, anggaran responsif gender, sikap birokrasi, komponen kognitif afektif, komponen *behaviour*, fakta sosial material.

This research aimed to understand the phenomenon of gender responsive budgeting in poverty alleviation. Data were collected by using the technique of in-depth interviews with the budget drafters at the office of Makassar Municipal Representative of The Manpower Ministry. Collected data were analysed using qualitative and applied a phenomenological approach. The results described that the components of bureaucratic attitudes were (1) the cognitive component referred to the understanding, trust, or apparatus information on gender responsive budgeting, (2) the affective component referred to the attitude of the apparatus towards gender responsive budgeting, (3) and behavior component referred to the predisposition of the apparatus to the gender responsive budget in action. This study showed the dominance of social fact materials in the application of gender responsive budgets.

Keywords: budget, gender responsive budgeting, bureaucratic attitudes, cognitive component, affective component, behaviour component, social fact materials

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4.1 Kegunaan Teoretis	9
1.4.2 Kegunaan Praktis	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Anggaran Responsif Gender.....	12
2.2 <i>Gender Analysis Pathway</i>	16
2.3 <i>Gender Budget Statement</i>	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Fenomenologi.....	23
3.1.1 Komponen-Komponen dalam Fenomenologi.....	26
3.1.2 Fenomenologi dalam Akuntansi.....	28
3.2 Rancangan Penelitian.....	30
3.2.1 Penentuan Informasi.....	32
3.2.2 Kehadiran Peneliti	32
3.2.3 Lokas Penelitian	32
3.2.4 Sumber Data	32
3.2.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.2.6 Teknik Analisis Data	33
3.2.7 Pengecekan Validitas Data.....	34
BAB IV ANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAKASSAR	36
4.1 Gender dan Anggaran Responsif Gender dalam Pahaman Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar.....	36
4.2 Penerapan Anggaran Responsif Gender di Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar.....	39

BAB V SIKAP BIROKRASI DAN FAKTA SOSIAL DALAM PENERAPAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER	42
5.1 Sikap Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar dalam Penerapan Anggaran Responsif Gender	42
5.2 Fakta Sosial dalam Penyusunan Anggaran Responsif Gender.....	45
BAB VI PENUTUP.....	48
6.1 Kesimpulan.....	48
6.2 Saran	49
6.3 Keterbatasan Peneliti.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Langkah-Langkah Penyusunan Perencanaan Responsif Gender	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.1	Status Kesejahteraan Masyarakat 40 Persen Terendah di Kota Makassar	7
2.1	Alur Kerja <i>Gender Analysis Pathway</i>	20
2.2	Format dan Langkah dalam Menyusun GBS.....	21

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Biodata.....	55
2	Anggaran Responsif Gender Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar ..	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan secara umum pada rumah tangga menjadi subyek kritik dari analisis gender (*United Nations Development Programme, 2003*). Perempuan dalam rumah tangga yang kaya belum tentu mendapatkan akses untuk memanfaatkan kekayaan keluarganya, sehingga melahirkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender disebabkan oleh marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe, atau melalui pelebelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender (Fakih, 2013).

Tumbuhnya budaya patriarki, yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, mengakibatkan kaum perempuan termarginalisasi dalam pembangunan. Stereotipe bahwa perempuan mesti mengerjakan tugas reproduksi atau domestik mengakibatkan perempuan mendapat beban kerja yang berlebih (Fakih, 2013). Beban kerja berlebih yang didapatkan perempuan mengakibatkan perempuan sulit mendapatkan akses dan partisipasinya dalam pembangunan, sehingga mengakibatkan kaum perempuan semakin miskin.

Fenomena ketimpangan dan kemiskinan yang dialami oleh kaum perempuan tersebut tentunya memerlukan kebijakan fiskal yang berpihak atau responsif gender. Elson (dalam Syarifuddin, 2016) menyatakan pengukuran fiskal memiliki efek berbeda pada laki-laki dan perempuan, sehingga anggaran yang

tidak netral gender mengakibatkan fenomena kebutaan gender dalam anggaran. Konferensi dunia keempat tentang perempuan di Beijing tahun 1995 telah mengeluarkan rekomendasi untuk menerapkan anggaran responsif gender (ARG) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kesetaraan dan keadilan gender, khususnya dibidang politik (UNDP, 2003).

Anggaran responsif gender sendiri merupakan suatu strategi untuk menilai dan merubah proses kebijakan-kebijakan sehingga belanja-belanja dan pendapatan mencerminkan perbedaan-perbedaan dan ketidakseimbangan antara perempuan dan laki-laki dalam aset pendapatan, pengambilan keputusan, kebutuhan, dan tanggung jawab sosial dapat teratasi (Sharp dan Elson, 2008). Perubahan-perubahan yang dimaksud ialah perbaikan belanja dan pendapatan pemerintah dengan memberikan pedoman yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui analisa-analisa yang dihasilkan oleh anggaran responsif gender.

South Africa Women Budgeting Initiative (SAWBI) (2000) menganalisis fenomena anggaran yang responsif gender pada departemen ketenagakerjaan terkait perempuan dan kerja. Hasil dari analisis tersebut ialah anggaran responsif gender yang diberlakukan telah berkontribusi dalam mengurangi pengangguran pada perempuan di Afrika Selatan. Namun, lapisan terbawah dari pekerja perempuan di Afrika Selatan tidak mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan ada banyak faktor yang berasal dari kebijakan ekonomi di luar departemen ketenagakerjaan. Oleh karena itu SAWBI merekomendasikan kebijak

Selanjutnya, SAWBI (2001) juga menganalisis sisi pendapatan dari anggaran di departemen ketenagakerjaan Afrika Selatan. Analisis ini berfokus pada penetapan tarif pasar tenaga kerja dan pajak bagi pekerja. Fokus analisisnya ialah pengaruh penetapan tarif pada pekerja perempuan dengan pekerjaan yang

berbeda, konsumen dan pedagang. Hasil dari analisis ini menunjukkan fenomena tarif yang ditentukan oleh departemen tenaga kerja memiliki pengaruh negatif yang disebabkan oleh kebijakan dan implementasi perdagangan. Dalam kasus ini, anggaran responsif gender dapat dijadikan metodologi analisis untuk mengadvokasi dampak globalisasi terhadap perempuan dan perempuan dalam dalam pengambilan keputusan.

Syarifuddin (2016) dalam penelitiannya menyatakan anggaran responsif gender dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kemiskinan. Anggaran responsif gender memiliki tujuan untuk mengembangkan nilai alternatif dan prinsip-prinsip dalam memprioritaskan kebutuhan sosial-ekonomi perempuan miskin, menyediakan alat untuk memantau pengeluaran dan memberdayakan pemerintah, memberdayakan pemerintah untuk mengembangkan penganggaran sensitif gender, dan memberdayakan masyarakat sipil untuk terlibat dalam diskusi tentang isu-isu di mana mereka terselisihkan.

Secara umum, realitas pembangunan kesetaraan gender dapat diketahui melalui *Gender Development Index* (GDI) atau Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Kuncoro, 2010). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) merilis IPG Indonesia tahun 2017 sebesar 90,96 persen dengan catatan IPM laki-laki 74,85 persen dan IPM perempuan 68,08 persen dari total IPM Indonesia 70,81 persen. Data ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan dalam pembangunan Indonesia.

Fenomena kemiskinan perempuan di Indonesia dapat digambarkan pada pengalangan perkapita kaum perempuan dibandingkan kaum laki-laki. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) merilis rata-rata

pengeluaran perkapita pertahun perempuan pada tahun 2017 sebesar 8.752 ribu rupiah, sedangkan pengeluaran per kapita per tahun laki-laki sebesar 14.932 ribu rupiah. Penyebab terjadinya kesenjangan pengeluaran perkapita pertahun antara perempuan dan laki-laki ialah tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang rendah. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia pada tahun 2017 sebesar 50,89 persen dan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki sebesar 82,51 persen (BPS,2017).

Timpangnya angka partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia karena stereotip pekerjaan kaum perempuan yang hanya pada ruang domestik. Di kawasan perkotaan perempuan memiliki akses yang lebih kecil dibandingkan dengan kaum laki-laki untuk mendapatkan pekerjaan formal (Todaro dan Smith, 2011). Pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, informasi dan komunikasi, serta *real estat* sebagai lapangan usaha dengan produktivitas tinggi masih diisi mayoritas laki-laki, sedangkan perempuan di Indonesia masih mendominasi beberapa sektor perekonomian yang tingkat produktivitasnya rendah seperti sektor jasa, penyediaan akomodasi dan perdagangan, sehingga ini berdampak pada penerimaan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki (KPPPA,2018). Menurut data KPPPA (2018) laki-laki tercatat menerima rata-rata upah 2,62 juta perbulan dan perempuan menerima rata-rata upah 2,48 juta perbulan.

Selanjutnya, polemik perempuan juga hadir di lingkungan kerja. Fenomena kebijakan yang tidak responsif gender dan perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan melahirkan ketidakadilan gender dan pemiskinan bagi kaum perempuan. Salah satu akibat dari kebijakan yang tidak responsif gender ialah kekerasan terhadap reproduksi biologis buruh. Kekerasan ini terjadi disebabkan

sulitnya perempuan mendapatkan cuti untuk haid dan hamil atau melahirkan yang dapat berujung pada PHK (Pakasi, 2006).

Selain pada bidang ketenagakerjaan, pendidikan juga menjadi sorotan dalam persoalan keadilan gender. Meskipun angka harapan sekolah perempuan dalam bidang pendidikan pada tahun 2017 mulai membaik tetapi pada realitanya perempuan memiliki angka lama sekolah yang rendah dibandingkan dengan laki-laki (KPPPA,2018). Menurut data BPS laki-laki di Indonesia memiliki harapan sekolah sebesar 12,93 tahun, sedangkan perempuan memiliki harapan sekolah 12,78 tahun dan angka lama sekolah perempuan di Indonesia hanya 7,65 tahun, sedangkan laki-laki 8,56 tahun.

Strategi pengarusutamaan gender di Indonesia telah dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 untuk menjadikan kepentingan dan pengalaman perempuan dan laki-laki menjadi dimensi integral dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dalam program pembangunan dan kesetaraan dan keadilan gender yang menjangkau semua instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Strategi pengarusutamaan gender didukung dengan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sebagai instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan (Kementerian Keuangan, 2010:19).

Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2018. Peraturan ini mengatur proses penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) dan pembuatan *Gender Budget Statement* (GBS) di lingkup satuan kerja pada

lampiran PMK Nomor 94/PMK02/2017. Sri Mulyani pada seminar *Voyage to Indonesia's Seminar on Women's Participation for Economic Inclusiveness* di Surabaya menyatakan "*Di Kementerian Keuangan, kami berusaha mendesain anggaran negara sedemikian rupa untuk mewujudkan anggaran yang responsif gender. Kami ingin perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, kontrol, manfaat yang sama dalam proses pembangunan*" (<https://www.liputan6.com>).

Beberapa daerah telah menerapkan anggaran responsif gender dalam menyusun kegiatan/program untuk mewujudkan kesetaraan gender. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti terkait penerapan anggaran responsif gender. Penelitian Khaerah dan Mutiarin (2016) memaparkan fenomena kurangnya kapasitas aparatur Dinas Kesehatan untuk menganalisis gender mengakibatkan Dinas Kesehatan Kota Makassar tidak mampu mengintegrasikan isu gender dalam penyusunan anggaran yang responsif gender.

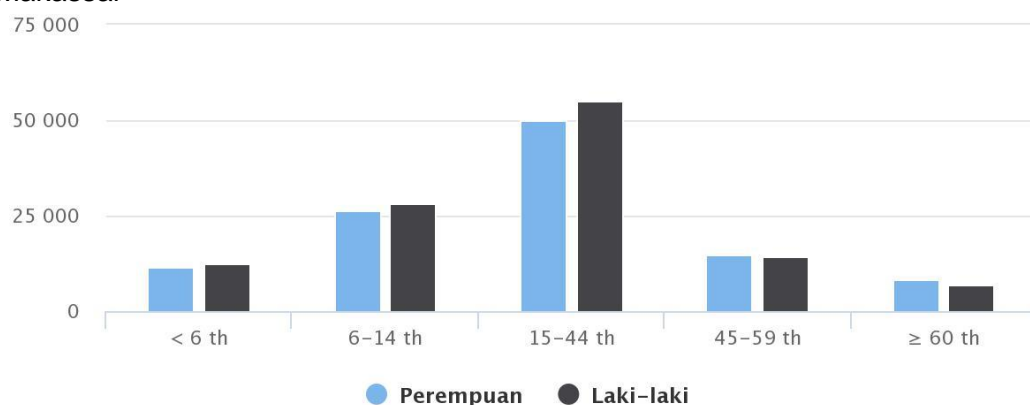
Astuti (2016) dalam penelitiannya menggambarkan fenomena bahwa Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bapermasper-KB, dan Kantor Kesbangpolinmas Kota Semarang telah menggunakan anggaran responsif gender. Namun, anggaran yang dialokasikan belum mencerminkan komitmen gender dalam komitmen anggaran. Hal ini ditunjukkan minimnya anggaran yang dialokasikan pada program-program penting untuk merealisasikan kesetaraan.

Susiana (2015) dalam penelitiannya di Provinsi Yogyakarta dan Papua menyatakan bahwa fenomena anggaran responsif gender di kedua provinsi tersebut telah mengimplementasikan anggaran responsif gender dan membuat *Gender Budget Statement*. Kendala yang dihadapi pada kedua kota tersebut ialah masih adanya anggapan bahwa analisis gender merepotkan dan rumit.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan membahas integrasi anggaran responsif gender dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di kota Makassar. Pemilihan kota Makassar sebagai objek penelitian dilandaskan pada Perwali Nomor 70 Tahun 2015 tentang Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Makassar Tahun 2015-2019 pasal 6 ayat (1) poin i, rencana program penanggulangan kemiskinan di kota Makassar diarahkan untuk pemenuhan kepada hak dasar kesetaraan dan keadilan gender. Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan disusun oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan dikoordinasikan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Pembangunan yang responsif gender, terkhusus penanggulangan kemiskinan, di kota Makassar masih belum memadai. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah merilis data status kesejahteraan masyarakat 40 persen terendah di kota Makassar berdasarkan usia dan jenis kelamin. Secara umum data tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1 Status Kesejahteraan Masyarakat 40 Persen Terendah di Kota Makassar



Sumber: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Grafik ini menunjukkan fenomena pada usia 6 tahun ke bawah jumlah perempuan yang berada pada tingkat kesejahteraan 40 persen terendah sebanyak 11.665 jiwa dan laki-laki sebanyak 12.660 jiwa. Pada usia 6-14 tahun jumlah perempuan yang berada pada tingkat kesejahteraan 40 persen terendah sebanyak 26.202 jiwa dan laki-laki sebanyak 28.288 jiwa. Pada usia 15-44 tahun jumlah perempuan yang berada pada tingkat kesejahteraan 40 persen terendah sebanyak 49.861 jiwa dan laki-laki sebanyak 54.905. Pada usia 45-59 tahun jumlah perempuan yang berada pada tingkat kesejahteraan 40 persen terendah sebanyak 14.964 jiwa dan laki-laki sebanyak 14.270 jiwa. Pada usia 60 tahun ke atas jumlah perempuan yang berada pada tingkat kesejahteraan 40 persen terendah sebanyak 8.556 jiwa dan laki-laki sebanyak 6.714 jiwa.

Pada bidang ketanagakerjaan, BPS Kota Makassar (2018) merilis angkatan kerja perempuan yang ada di kota Makassar pada tahun 2017 sebesar 216.985 orang dengan jumlah orang yang bekerja sebesar 189.971 orang, sedangkan angkatan kerja laki-laki sebesar 396.337 orang dengan jumlah orang yang bekerja sebesar 358.397 orang. Secara menyeluruh presentase partisipasi angkatan kerja kaum perempuan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan kaum laki-laki. Presentase partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 38,38 persen, sedangkan laki-laki sebesar 72,90 persen.

Berdasarkan data tersebut, kemiskinan di kota Makassar masih menjadi persoalan apalagi jika dilihat berdasarkan sudut pandang gender maka baik laki-laki dan perempuan masih membutuhkan bantuan pemerintah. Oleh karenanya, judul yang akan diusulkan peneliti ialah **“Fenomena Anggaran Responsif Gender dalam Penanggulangan Kemiskinan”** dengan menjadikan Dinas Tenaga Kerja sebagai objek penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena anggaran responsif gender dalam penanggulangan kemiskinan di Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui bagaimana fenomena anggaran responsif gender dalam penanggulangan kemiskinan di Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

1. Memberikan kontribusi dalam bidang ilmu akuntansi dan pengembangannya, khususnya pada akuntansi sektor publik dalam membahas penerapan anggaran responsif gender pada penanggulangan kemiskinan.
2. Memberikan wawasan tambahan kepada pembaca terkait anggaran responsif gender pada penanggulangan kemiskinan yang didukung oleh berbagai teori yang melandasi penelitian ini.
3. Menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya yang memiliki minat untuk meneliti anggaran responsif gender pada penanggulangan kemiskinan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi instansi terkait yang diteliti dan dapat menjadi pedoman untuk mengembangkan kemampuan pelaksanaan anggaran responsif gender pada penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas sebagai tambahan wawasan dan dapat meningkatkan partisipasinya dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- BAB I: Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II: Tinjauan Pustaka, berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.
- BAB III: Metode Penelitian, berisi rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, dan analisis data.
- BAB IV: Hasil dan Pembahasan, berisi gambaran instansi, deskripsi sampel penelitian, hasil uji kualitas data, hasil uji asumsi klasik, hasil pengujian hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V: Penutup, berisi kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian hingga saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran Responsif Gender

Setelah terbitnya Instruksi Presiden tentang Pengarusutamaan Gender tahun 2000 Kementerian Keuangan mensinergikan pengarusutamaan gender (PUG) di lingkup kementeriannya. Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 199/PMK.02/2009 dan PMK 104/PMK/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelahaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2011 sebagai acuan penyusunan anggaran responsif gender di Kementerian dan Lembaga. Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Surat Edaran No.270/M.PPN/11/2012; No.SE33/MK.02/2012; No.050/4379A/SJ dan SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Anggaran Responsif Gender (ARG) sendiri merupakan anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh akses, manfaat, kontrol, dan pengambilan keputusan serta kesempatan dan memiliki peluang dalam menikmati hasil pembangunan (KPPPA, 2010). Sebagaimana definisinya, ARG dimaksudkan sebagai instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan. Namun demikian, ARG bukanlah suatu bentuk penganggaran yang baru melainkan pelengkap dalam menyusun dokumen perencanaan strategis dan dokumen rencana kerja dan anggaran di daerah pada penganggaran yang ada (Nurhaeni, 2014).

KPPPA (2010) membagi ARG menjadi tiga kategori yaitu, anggaran khusus target gender (atau anggaran untuk pemenuhan spesifik menurut jenis kelamin), anggaran pelembagaan kesetaraan gender (atau anggaran untuk *affirmative action* / tindakan afirmasi), dan anggaran kesetaraan gender (atau pengeluaran secara umum). Anggaran khusus target gender merupakan alokasi anggaran yang diperuntukkan pemenuhan kebutuhan dasar khusus perempuan dan laki-laki berdasarkan hasil analisis gender. Anggaran pelembagaan kesetaraan gender merupakan alokasi anggaran yang diperuntukkan dalam penguatan pelembagaan PUG, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Anggaran kesetaraan gender merupakan alokasi anggaran yang diperuntukkan guna mengatasi masalah dalam berbagai bidang pembangunan.

Anggaran khusus target gender dapat dialokasikan dengan hanya laki-laki ataupun perempuan maupun keduanya sebagai penerima manfaat tergantung permasalahan yang dihadapi masing-masing jenis kelamin serta nama program dan atau kegiatan SKPD (Nurhaeni, 2014). Apabila yang termarginalkan hanya perempuan maka anggaran yang dialokasikan hanya untuk perempuan begitupun sebaliknya serta apabila kedua jenis kelamin tersebut termarginalkan maka anggaran yang dialokasikan diperuntukkan kepada kedua jenis kelamin tersebut. SKPD yang menggunakan anggaran khusus gender ialah unit kerja/bagian pemberdayaan perempuan. Meskipun begitu, SKPD lainnya dapat menggunakan anggaran khusus gender selama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Beberapa contoh anggaran khusus gender yaitu, anggaran untuk bantuan modal bagi perempuan difabel, anggaran untuk kegiatan KB dengan sasaran laki-laki, anggaran untuk Bimtek kewirausahaan bagi difabel, dll.

Anggaran kelembagaan kesetaraan gender memiliki fungsi untuk meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan memperkuat prasyarat

kunci PUG. Peningkatan IDG dan penguatan prasyarat kunci PUG sangat ditentukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Gender maupun *Gender Focal Point* (GFP) untuk itu sangat penting memperhitungkan komitmen pimpinan untuk mengintegrasikan kesetaraan gender dalam kebijakan publik, adanya dukungan regulasi, terbentuknya kelembagaan PUG, adanya dukungan kapasitas SDM, tersedianya data terpilih menurut jenis kelamin pada setiap SKPD secara valid dan akurat, tersedianya perangkat untuk menganalisis gender, serta dukungan masyarakat, sehingga penerima manfaat anggaran kelembagaan kesetaraan gender adalah pejabat perempuan, aparat pemerintah, organisasi nonpemerintah, dan Organisasi Masyarakat (Ormas). Anggaran ini biasanya dialokasikan oleh SKPD bagian Pemberdayaan Perempuan, Bappeda, dan Badan Kepegawaian Daerah serta SKPD lainnya yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai. Beberapa contoh anggaran kelembagaan kesetaraan gender yaitu, anggaran untuk pendidikan politik bagi perempuan, anggaran koordinasi PUG, anggaran untuk koordinasi PPRG, anggaran untuk mendorong regulasi kesetaraan dan keadilan gender, dll.

Anggaran kesetaraan gender memiliki fungsi mengurangi kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender. Laki-laki dan perempuan secara umum menjadi penerima manfaat dari alokasi anggaran kesetaraan gender. Anggaran ini dialokasikan oleh seluruh SKPD dengan tujuan pokok dan fungsinya masing-masing karena melingkupi seluruh bidang. Beberapa contoh anggaran kesetaraan gender yaitu, anggaran bagi rumah tangga miskin, anggaran pelatihan tenaga kerja migran, anggaran pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, dll.

Langkah-langkah yang dibutuhkan dalam menyusun ARG dapat dilihat pada tabel 2.1 yang dapat menjadi acuan untuk menyusun analisis atau mengidentifikasi isu kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan.

Tabel 2.1 Langkah-Langkah Penyusunan Perencanaan Responsif Gender

Langkah 1	Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program, dan kegiatan/sub kegiatan yang ada. Pilih kebijakan/program/kegiatan/pembangunan yang dianalisis, baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat (baru)
Langkah 2	Menyajikan data terpilih menurut jenis kelamin sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (data yang kualitatif atau kuantitatif). Data pembuka wawasan bisa berupa data statistik yang kuantitatif dan/atau kualitatif yang dihimpun dari <i>baseline survey</i> , dan/atau hasil <i>Focus Group Discussion</i> (FGD), dan/atau review pustaka, dan/atau hasil kajian, dan/atau hasil pengamatan, dan/atau hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan atau dapat pula menggunakan hasil <i>monev</i> tiga tahun berturut-turut.
Langkah 3	Identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Temu kenali isu gender diproses perencanaan kebijakan/program/kegiatan dengan menganalisis data pembuka wawasan dengan melihat empat faktor kesenjangan yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.
Langkah 4	Temu kenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender. Temu kenali isu gender di internal lembaga dan/atau budaya organisasi yang (dapat) menyebabkan terjadinya isu gender. Misalnya: produk hukum, kebijakan, pemahaman tentang gender yang masih lemah dari pengambil keputusan, perencanaan, staf, dan lainnya, dan <i>political will</i> atau pengambil ketersediaan data, belum optimalnya koordinasi lintas bidang/sector, belum optimal advokasi/sosialisasi
Langkah 5	Temu kenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan. <ul style="list-style-type: none"> • Perlu diperhatikan apakah pelaksanaan program sudah/belum peka terhadap kondisi isu gender di masyarakat yang menjadi target program. • Perhatikan kondisi masyarakat sasaran (target grup) yang belum kondusif.
Langkah 6	Reformulasikan tujuan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan menjadi responsif gender. Tidak perlu membuat tujuan baru, sifatnya menajamkan/membuat lebih fokus.
Langkah 7	Susun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender.

Langkah 8	Tetapkan <i>base line</i> , yaitu data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan (progres) pelaksanaan kebijaksanaan/program/kegiatan. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang menunjang capaian kinerja kebijakan/program/kegiatan.
Langkah 9	Tetapkan indikator gender baik kuantitatif maupun kualitatif.

2.2 Gender Analysis Pathway

Gender Analysis Pathway (GAP) diterapkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1999 untuk menganalisis kebijakan dan program di lima sektor Rencana Pembangunan Lima Tahun VI (Repelita VI). 5 sektor tersebut ialah ketenagakerjaan, pendidikan, hukum, pertanian, serta koperasi dan usaha kecil menengah (Bapenas, 2001). Hasil dari analisis GAP pada Repelita VI kemudian dimasukkan dalam Repelita VII yang menghasilkan rumusan Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004. Isi dari Propenas 2000-2004 ialah penjabaran dari GBHN 1999-2004. GBHN 1990-2004 inilah yang pertama kali mengamanatkan pembangunan di Indonesia untuk memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

GAP adalah Alat analisis yang digunakan dalam menyusun perencanaan yang responsif gender. GAP merupakan alat analisis yang digunakan untuk perencana untuk merancang kegiatan/program/kebijakan/proyek pembangunan agar responsif terhadap gender yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) (Bappenas, 2001). Analisis dibuat dengan mengacu kebijakan saat ini serta berbagai isu gender dengan memasukkan gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam semua kegiatan pembangunan, gambaran adanya faktor penghambat di internal lembaga (lembaga pemerintah) dan atau eksternal lembaga masyarakat, indikator *outcome* yang dapat dihubungkan dengan tujuan

kegiatan, dan indikator *input* atau *output* yang dapat dihubungkan dengan bagian pelaksanaan kegiatan.

Tahapan yang harus dilakukan dalam menyusun GAP, sebagai berikut:

Langkah 1: Pilih kebijakan/program/kegiatan yang akan dianalisis

Kebijakan/program/kegiatan yang dipilih hendaknya memiliki pengaruh besar dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender ataupun mendukung kebijakan prioritas pemerintah yang mampu mewujudkan visi misi Kepala Daerah, program prioritas nasional ataupun komitmen internasional. Setelah memilih kebijakan/program/kegiatan ialah mengidentifikasi tujuan program/kegiatan pembangunan yang ada.

Langkah 2: Sajikan data pembuka wawasan terpilih menurut jenis kelamin

Data terpilih merupakan data kuantitatif atau data kualitatif berdasarkan jenis kelamin yang dapat menggambarkan kondisi umum dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat. Data terpilih berfungsi untuk mengetahui perbedaan keadaan perempuan dan laki-laki berdasarkan tempat dan waktu yang berbeda, melihat hasil intervensi pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki, memberi *input*/masukan untuk melakukan analisis gender, mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Data terpilih ini dapat diperoleh dari hasil *baseline study* dan hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan yang sedang dan sudah dilakukan ataupun data yang berupa pencatatan pelaporan internal SKPD tentang intervensi yang sudah dan sedang dilakukan.

Langkah 3: Temu kenali isu gender di proses perencanaan kebijakan/program/kegiatan

Isu gender pada proses perencanaan kebijakan/program/kegiatan dapat dilihat pada aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM). Data akses

yang dimaksud ialah data tentang peluang dalam memanfaatkan sumber daya. Data partisipasi adalah data yang memperlihatkan *knowledge, attitude, practice* dari seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam aktivitas pembangunan, mencakup aktivitas perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi. Data kontrol merupakan data yang memperlihatkan kemampuan seseorang dan/atau masyarakat untuk mengambil keputusan guna melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Data manfaat merupakan data dari manfaat hasil pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dirasakan oleh masyarakat.

Langkah 4: Temu kenali isu gender di internal lembaga/budaya organisasi

Pada tahap ini diperlukan analisis untuk menemukan isu gender di internal lembaga/SKPD seperti ada tidaknya produk hukum yang mendukung kesetaraan dan keadilan gender, ada tidaknya pemahaman pengambilan keputusan dan perencanaan pada internal lembaga/SKPD tentang kesetaraan dan keadilan gender, ada tidaknya budaya organisasi yang mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

Langkah 5: Temu kenali isu gender di eksternal lembaga/SKPD

Perlunya analisis eksternal untuk menemukan isu gender, seperti: kuatnya budaya patriarki, adanya stereotipe gender, adanya sub-ordinasi, adanya beban ganda, adanya marginalisasi gender, adanya kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin.

Langkah 6: Reformulasi Tujuan

Kebijakan/program/kegiatan yang telah disusun secara umum bersifat netral gender, sehingga belum mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Langkah ini bertujuan untuk mereformulasi tujuan kebijakan/program/kegiatan agar menjadi responsif gender. Jika tujuan

kebijakan/program/kegiatan sejak awal telah responsif gender maka tidak diperlukan reformulasi tujuan.

Langkah 7: Rencana Aksi ke depan

Langkah ini bertujuan untuk menyusun atau merumuskan rencana aksi yang responsif gender atau mampu mengatasi kesenjangan gender berdasarkan identifikasi pada langkah 3, 4, dan 5.

Langkah 8: Penetapan *baseline* data

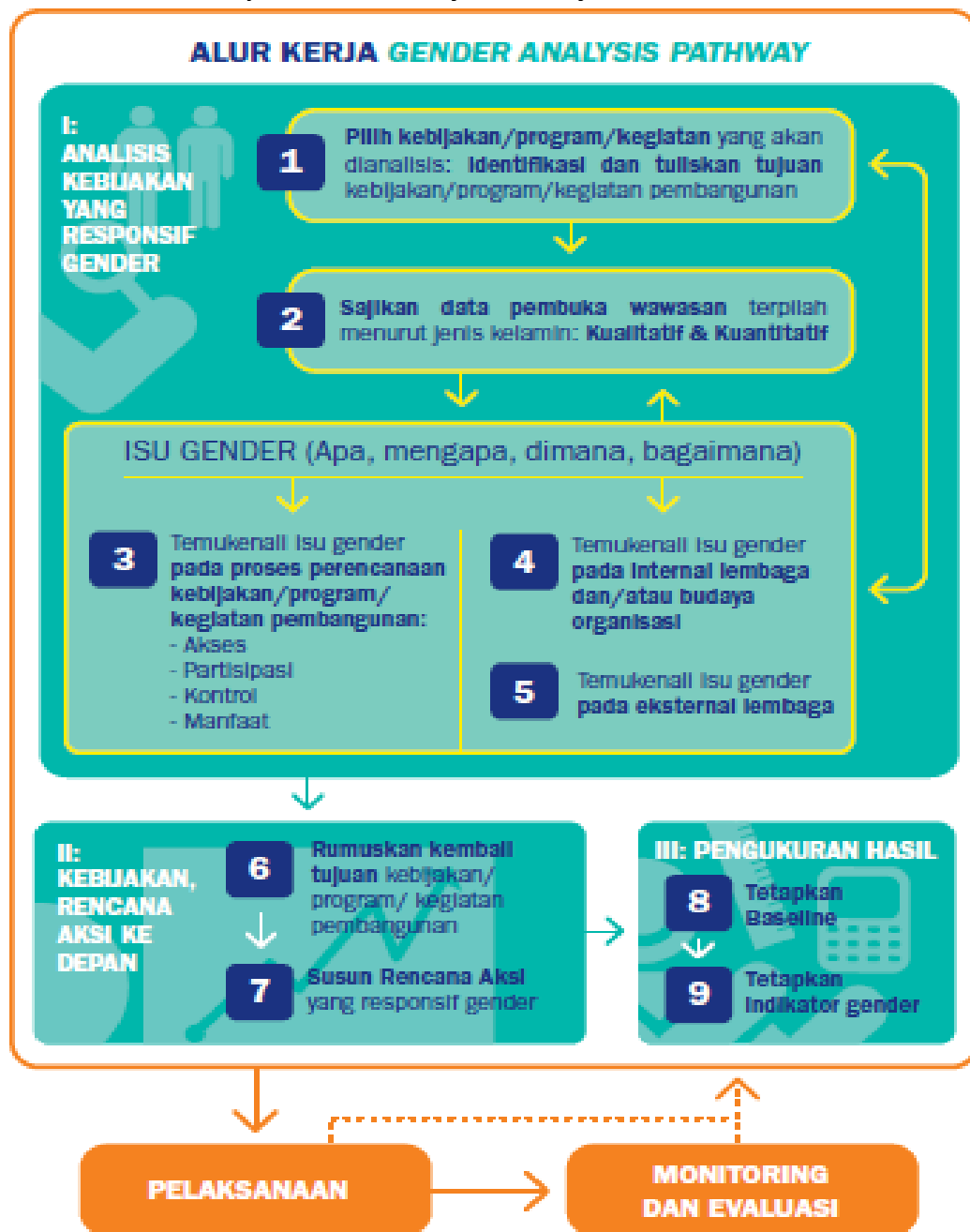
Pada langkah ini analis menetapkan *baseline* data untuk mengukur kemajuan dari program/kegiatan yang telah direncanakan. *Baseline* data bersumber dari data pembuka wawasan yang telah dilakukan pada langkah ke-2 yang bisa digunakan sebagai dasar awal penetapan kinerja kegiatan (*output*) dan kinerja program (*outcome*).

Langkah 9: Tetapkan indikator gender

Pada langkah ini analis menyusun indikator gender yang merupakan ukuran kuantitatif ataupun kualitatif yang bertujuan untuk memperlihatkan adanya upaya memperkecil kesenjangan gender sebagai hasil dan manfaat dari pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan. Indikator gender dapat dibedakan dalam *output* dan *outcome*. *Output* adalah barang, jasa, atau fasilitas lain yang diterima oleh sekelompok masyarakat, baik kelompok sasaran maupun kelompok lain yang tidak dimasukkan untuk disentuh oleh kebijakan. *Outcome* atau dampak adalah perubahan kondisi sosial maupun fisik yang merupakan akibat dari *output* kebijakan.

Secara umum langkah-langkah dalam melakukan GAP dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1 Alur Kerja Gender Analysis Pathway



Sumber: Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD)

2.3 Gender Budget Statement

Gender Budget Statement (GBS) merupakan dokumen yang menginformasikan *output* kegiatan telah responsif gender, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan yang responsif gender (Kemenkeu, 2010). GBS disusun dengan mengisi format yang telah disediakan sesuai dengan data GAP. Dokumen ini kemudian berfungsi sebagai dokumen akuntabilitas yang spesifik gender.

GBS disusun berdasarkan hasil dari GAP yang ditransformasikan ke dalam. Secara umum langkah dalam menyusun GBS dapat dilihat dalam Gambar 2.2 yang hampir seluruh bagian GBS merupakan hasil salinan dari GAP.

Gambar 2.2 Format dan Langkah dalam Menyusun GBS

Gender Budget Statement (Pernyataan Anggaran Gender)	
Nama SKPD : Alamat : Tahun Anggaran :	
Program	Pindahkan isian pada GAP langkah ke-1
Tujuan Program	Pindahkan isian pada GAP langkah ke-1
Capaian Program	Indikator capaian program diambil dari indikator kinerja yang ada pada Renstra atau Renja SKPD
Kegiatan	Pindahkan isian pada GAP langkah ke-1
Tujuan Kegiatan	Pindahkan isian pada GAP langkah ke-1
Kode Rekening kegiatan	Isikan kode rekening
Analisis Situasi	Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani melalui kegiatan yang menghasilkan output. Berisi tentang: <ul style="list-style-type: none"> • Data pembuka wawasan sebagaimana telah tertuang dalam GAP langkah ke-2 • Faktor kesenjangan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat) sebagaimana telah tertuang dalam GAP langkah ke-3 • Sebab kesenjangan internal sebagaimana telah tertuang dalam GAP langkah ke-4 • Sebab kesenjangan eksternal sebagaimana telah tertuang dalam GAP langkah ke-5

Lanjutan Gambar 2.2 Format dan Langkah dalam Menyusun GBS

Perencanaan Kegiatan	Rencana Aksi (isikan langkah GAP ke 7) (kegiatan yang berkontribusi pada kesetaraan gender)	
		Tujuan (isikan langkah GAP ke 6)
		Aktivitas	Isikan jabaran langkah GAP ke 7 yang mampu menjawab permasalahan gender yang telah teridentifikasi pada langkah ke 3, 4, dan 5
		Sumberdaya	Dana:
			SDM: (mencakup Panitia, Fasilitator dan peserta kegiatan (dipilah menurut jenis kelamin)
Indikator Output	Sarana dan Prasarana Ambil dari langkah GAP ke-9, dihubungkan dengan barang dan jasa/ pelayanan yang dihasilkan dari kegiatan SKPD		
Alokasi Sumber Daya	Dana	Jumlah anggaran yang diperlukan untuk pencapaian output kegiatan	
	SDM	Jumlah SDM yang diperlukan untuk pencapaian output kegiatan, baik SDM sebagai nara sumber/ fasilitator, panitia kegiatan maupun peserta program/ kegiatan (dipilah menurut jenis kelamin)	
	Sarana dan Prasarana	Peralatan yang dibutuhkan untuk pencapaian output kegiatan	
Dampak/Manfaat (Outcome)	Ambil dari langkah GAP ke-9, dihubungkan dengan dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan program SKPD. Dampak program harus berkontribusi terhadap penurunan/penghapusan kesenjangan gender dalam bidang pembangunan		

Sumber: Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD)